

2018

RENCANA KERJA



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI**

KATA PENGANTAR

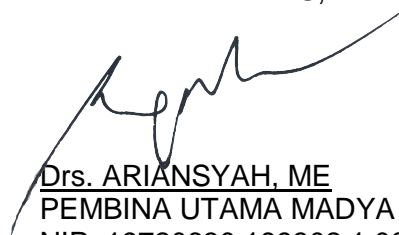
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2018 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan Rencana Kerja tersebut juga merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 untuk jangka Waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan prioritas program dan kegiatan yang akan direncanakan serta pendanaannya.

Rancangan Renja ini juga merupakan amanah yang tertuang dalam Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian penetapan kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Penetapan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memberikan gambaran tentang tahapan yang akan dicapai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Untuk mendukung program dan kegiatan yang akan ditetapkan pada tahun 2019 yang didanai dari APBD Provinsi Jambi tahun 2019, dalam prosesnya bermuara pada Kebijakan Umum APBD Provinsi Jambi Tahun 2019.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Jambi, Juli 2018

KEPALA DINAS,



Drs. ARIANSYAH, ME
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19720630 199302 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	21
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	24
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	24
3.2. Tujuan dan Sasaran.....	26
3.3. Program dan Kegiatan	29
BAB IV PENUTUP	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I	
Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004	2

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	8
Tabel 2 Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2014	12
Tabel 3 Realisasi Anggaran Dinas Perindag Provinsi Jambi Menurut Bidang, UPTD dan Sekretariat	13
Tabel 4 Realisasi Anggaran Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2014.....	14
Tabel 5 Evaluasi Hasil Renja Dinas Perindag Provinsi Jambi Periode Pelaksanaan Tahun 2014.....	19
Tabel 6 Event Pameran Yang Diikuti Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2010-2014.....	27
Tabel 7 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah).....	34
Tabel 8 Perkembangan Usaha Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2014.....	35
Tabel 9 	36
Tabel 10 Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jambi Tahun 2010-2014.....	37
Tabel 11 Ekspor Bersih Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 (US \$ Juta).....	40
Tabel 12 	40
Tabel 13 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2010-2014.....	40
Tabel 14 Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar Provinsi Jambi Tahun 2010-2014	52
Perkembangan Sentra Industri Kecil Provinsi Jambi Tahun 2010-2014	52
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017	

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Tabel 1 Perkembangan Penerimaan PAD Dari Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Komoditi Ekspor Tahun 2010- 2014.....	32
Tabel 2 Perkembangan Penerimaan PAD Dari Jasa Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun 2010-2014	34

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) SKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat (lampiran 6, Permendagri No. 54 Tahun 2010). Renja Disperindag Provinsi Jambi memiliki arti strategis untuk penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Dokumen Renja menjadi dasar bagi SKPD untuk memuat program, kegiatan di dalam KUA dan PPAS serta rencana program, kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu

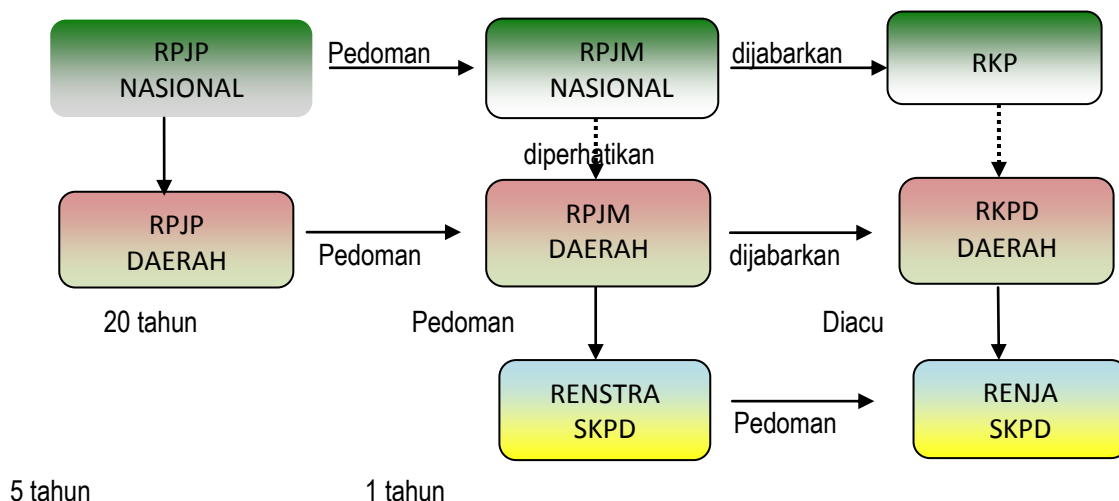
pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).

5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
6. Progam/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2019 juga berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2019-2020 dan mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Jambi Tahun 2019. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2019 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU No. 25/2004



1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 terdiri dari Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7)
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 sehingga lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.
2. Sebagai acuan dalam rangka penyusunan RKA-DPA Tahun 2019.

Tujuan

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya dan perkiraan pencapaian tahun berjalan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas SKPD.
2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Laludan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- ### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai :**

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
 2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium DevelopmnetGoals*);
 3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
 4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2018 pada triwulan II, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Dari hasil kinerja dimaksud Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menetapkan sebanyak 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai. Ke 4 sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan 7 Indikator Kinerja. Realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2018, menunjukkan bahwa indikator telah dicapai dengan hasil yang “Rendah”. Adapun rincian tingkat capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Sasaran Strategis 1				
<i>Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Industri Kecil, Menengah dan Besar</i>				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Jumlah usaha industri kecil, menengah dan besar (unit)	3 %	20,51%	14,63 %	Rendah
Jumlah tenaga kerja industri kecil, menengah dan besar	52 %	5,48 %	10,53 %	Rendah
Peningkatan SDM IMB yang mendapat pelatihan Teknologi Industri	10 %	00%	-	-
Pengembangan Wirausaha baru	99 %	17,24 %	17,41 %	Rendah
Rata-rata Capaian Sasaran Staregis 1			20,92 %	
Sasaran Strategis 2				
<i>Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Perdagangan Dalam Negeri</i>				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Jumlah usaha perdagangan (unit)	72 %	31,87 %	44,26 %	Rendah
Rata-rata Capaian Sasaran Staregis 2			44,26 %	

Sasaran Strategis 3				
Pertumbuhan Ekspor Non Migas dalam Perkuatan Perdagangan Daerah Jambi				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Kenaikan nilai ekspor	10%	30,59 %	43,7%	Cukup
Rata-rata Capaian Sasaran Staregis 3			43,7%	
Sasaran Strategis 4				
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jasa pelayanan UPTD BPSMB				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Jumlah jasa pelayanan pengujian mutu komoditi ekspor (sampel)	10 %	25,93 %	37,04 %	Cukup
Rata-rata Capaian Sasaran Staregis 4			37,04 %	

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum, kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada sasaran I (satu) ini telah memberikan capaian yang **sangat baik** ini terlihat dari angka realisasi rata-rata 20,92 persen.

Berdasarkan realisasi yang telah diperlihatkan oleh masing-masing indikator kinerja, maka dapat dievaluasi bahwa peningkatan ke 4 (empat) Indikator Kinerja sebagaimana tersebut diatas disebabkan oleh bergairahnya sektor ekonomi khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan serta terciptanya suasana kondusif yang terciptakan di Kabupaten/Kota guna menarik investor untuk menanamkan modalnya sehingga sepanjang 2018 ini telah terjadi peningkatan dalam jumlah nilai investasi yang berdampak pada peningkatan nilai jumlah unit usaha industri, jumlah nilai produksi dan penyerapan tenaga kerja di bidang industri kecil, menengah dan besar.

Selain faktor pendorong berkembangnya Industri Kecil, Menengah dan Besar (IKMB) sebagaimana tersebut diatas, maka juga ada beberapa faktor penghambat berkembangnya IKMB yaitu belum optimalnya pembinaan IKMB yang disebabkan luasnya wilayah dan banyaknya pelaku usaha industri yang harus dibina merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program ini, disamping belum optimalnya dukungan keterkaitan mitra antara usaha besar dan BUMN baik berupa penyediaan bahan baku, modal dan pasar serta terbatasnya akses pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka akses pasar, produktifitas, alih teknologi dan desain.

Adapun solusi bagi permasalahan ini antara lain meningkatkan mitra usaha dengan usaha besar dan BUMN, memasyarakatkan system teknologi informasi dan melakukan

koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota dalam upaya pembinaan IKM.

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Secara umum, kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada sasaran 2 (dua) ini telah memberikan capaian yang *sangat baik* ini terlihat dari angka realisasi rata-rata 44,26 persen

Berdasarkan realisasi yang telah diperlihatkan oleh masing-masing indikator kinerja. maka dapat dievaluasi bahwa peningkatan ke 3 (tiga) IKU sebagaimana tersebut diatas disebabkan oleh bergairahnya aktivitas perdagangan melalui kegiatan pasar lelang karet dan agro di Kabupaten sepanjang tahun 2018 ini.

3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Secara umum, kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada sasaran 3 (tiga) ini telah memberikan capaian yang **cukupbaik** ini terlihat dari angka realisasi rata-rata 43,7 persen.

Memperhatikan tcapaian kinerja I tersebut diatas terlihat bahwa nilai ekspor non migas Provinsi Jambi dari tahun ketahun mengalami naik turun. Adapun faktor penyebabnya antara lain :

1. Menurunnya permintaan di beberapa Negara mitra dagang Indonesia diakibatkan oleh menurunnya harga beberapa komoditas utama ekspor Indonesia.
2. Kebijakan bea keluarnya produk ekspor yang kadang mengalami perubahan.
3. Kondisi perlambatan perekonomian di wilayah eropa yang menjadi pasar ekspor utama Indonesia.
4. Daya saing produk Indonesia menurun dan ditambah pula masalah retribusi fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Untuk meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor Provinsi Jambi khususnya dan Indonesia umumnya, maka upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan ekspor antara lain :

1. Meningkatkan rangkaian kebijakan dan program yang difokuskan pada peningkatan kualitas SDM eksportir serta kualitas produk ekspor Indonesia.
2. Perlunya diversifikasi Negara mitra dagang serta produk ekspor / komoditas.
3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing nasional agar Indonesia dapat menjaga nilai ekspor dan menghasilkan produk berkualitas ditingkat internasional.
4. Memfasilitasi eksportir dan UKM dalam melakukan pengembangan dan adaptasi produk guna meningkatkan kualitas dari produk ekspor utama daan produk potensial.

5. Meningkatkan industri hilirisasi dengan membangun pabrik pengola sehingga Indonesia dapat mulai melakukan ekspor untuk produk olahan bahan mineral. Upaya hilirisasi ini dapat melahirkan antara lain :
 - a. Menghasilkan lapangan pekerjaan.
 - b. Keuntungan inovasi pada produk bernilai tambah tinggi bagi Negara kita.
 - c. Melakukan multiplayer effect beberapa kemandirian dalam sektor ekspor nasional.
 - d. Peningkatan penerimaan Negara.

4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Secara umum, capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada sasaran 4 (empat) ini telah memberikan capaian yang **sangatbaik** ini terlihat dari angka realisasi rata-rata 37,7 persen.

B. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Pagu anggaran belanja tidak langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 12.605.000.000,-. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 2.037.904,99,- atau 16,17 %.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebesar 95,65% dan capaian keuangan sebesar 91,95 %. Dengan capaian kinerja dan keuangan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya. Namun demikian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2018 ini terdapat 5 (lima) kegiatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang tidak memenuhi target kinerja ($\leq 100\%$) sebagaimana yang telah direncanakan antara lain :

- a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (12,28%). Faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu tidak terlaksananya pengadaan yang berkaitan dengan sarana kuliner dan cendramata sebesar Rp. 50.000.000,- dikarenakan bangunan untuk sarana kuliner dan cendramata yang berlokasi disamping menara gentala arasy belum dibangun oleh pihak PU Provinsi Jambi sampai dengan akhir 2018.
- b. Kegiatan Pengadaan Meubeler (54,46%). Faktor penyebab tidak tercapainya target hampir sama dengan point 1 (satu) yaitu tidak terlaksananya pengadaan yang berkaitan dengan sarana kuliner dan cendramata sebesar Rp. 129.346.700,-.000,-
- c. Kegiatan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (59,57%). Faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu tidak bisa dicaikannya pembayaran uang lembur dikarenakan adanya *surat Sekda Provinsi Jambi No. 062/Setda.Keu-1.2/I/20014 tanggal 27 Januari 2018 Hal Uang Lembur dan Uang Makan Lembur* dibeberapa kegiatan tidak boleh direalisasikan.
- d. Kegiatan Pameran Luar Negeri (0%). Faktor penyebab tidak tercapainya target karena adanya ***Surat Sekda Provinsi Jambi No. S.290/054/SETDA/KEU tanggal 9 Januari 2014 Hal Pelarangan Perjalanan Dinas Keluar Negeri Kecuali Bagian Keuangan dan BKPM***.
- e. Kegiatan Dukungan dan Pengembangan Pasar Lelang Karet. Faktor penyebab tidak tercapainya target dikarenakan sampai dengan akhir triwulan II tahun 2018 proposal bantuan alat/timbangan karet dari masyarakat belum ada yang masuk sehingga diputuskan hibah alat untuk masyarakat tersebut tidak jadi dilaksanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dari 12 program dan 63 kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada tahun 2018 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan (100%) hanya sebanyak 8 program dan 55 kegiatan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (100%) untuk tahun 2018 tidak ada,

4. Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi..

6. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pencapaian Kinerja Pembangunan Bidang Industri dan Perdagangan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selama rentang waktu 4 tahun terakhir (2010-2018) tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Provinsi Jambi

dibawah kepemimpinan Bapak H. Zomi Zola Zulkifli Nurdin selaku Gubernur Jambi dan H. Fachrori Umar selaku Wakil Gubernur Jambi serta jajaran Pemerintah Provinsi Jambi.

Selaku instansi yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Jambi Nomor 14 Tahun 2008 mempunyai tugas fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008, terus berusaha secara maksimal melakukan berbagai langkah dan kebijakan strategis dalam mendukung visi dan misi Gubernur Jambi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.

Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Jambi dimana lebih kurang 30 persen PDRB Jambi berasal dari kedua sektor ini. Selain itu kedua sektor ini memegang peranan strategis di Provinsi Jambi terkait liberalisasi ekonomi regional dalam payung ASEAN dimana mulai tahun 2015 akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean/Asean Economic Community (MEA/AEC) 2015.

Dengan diberlakukannya AEC pada tahun 2015, ini membuka peluang yang sangat besar bagi Indonesia antara lain :

- a. Meningkatnya peluang masuknya produk Indonesia negara ASEAN dengan tingkat tarif yang relatif rendah
- b. Meningkatnya kerjasama antara pulau bisnis negara ASEAN melalui pembentukan aliansi strategis
- c. Meningkatkan kepastian bagi produk unggulan Indonesia dalam memanfaatkan peluang pasar ASEAN
- d. Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis di negara ASEAN

Disamping membuka peluang yang sangat besar, perjanjian AEC ini juga memberikan tantangan bagi keberlanjutan produk-produk dari Indonesia diantaranya adalah :

- a. Meningkatnya daya saing produk baik kualitas maupun harga
- b. Strategi peningkatan nilai tambah bagi produk ekspor sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dengan produk dari negara ASEAN lainnya.
- c. Peningkatan keunggulan kompetitif disektor prioritas integrasi
- d. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang trampil dan bersertifikat sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun antar ASEAN untuk mencegah banjirnya tenaga kerja trampil dari luar.

Dalam rangka menghadapi peluang dan tantangan yang semakin kompetitif karena produk-produk lokal yang masuk dalam pasar tersebut akan berhadapan langsung dengan produk-produk yang berasal dari berbagai negara, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap pasar domestik. Begitu juga dengan tenaga kerja yang masuk dari Negara lain. Oleh karenanya diperlukan strategi dalam mendorong industri perdagangan untuk meningkatkan daya saing produk yang kita miliki antara lain dengan :

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan hal yang paling krusial terutama dalam menghadapi AEC. SDM yang berkualitas akan mampu bersaing dan kuat menghadapi tantangan. Peningkatan kualitas SDM misalnya dengan pelatihan bahasa sangat penting dalam peranan persaingan global, terutama bahasa Inggris. Selain itu pengembangan skill dapat dilakukan dengan pelatihan, workshop, pertemuan rutin antar pelaku ekonomi.

b. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pemberdayaan UMKM sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Persaingan dalam hal kualitas maupun kuantitas yang bukan hanya untuk pasar local dan nasional tetapi juga ekspor. Semakin banyak UMKM yang bisa mengekspor akan semakin besar pula daya saing ekonomi Indonesia.

c. Penyediaan Modal

Permodalan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu usaha. Oleh karenanya dibutuhkan lembaga permodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagai skala. Terutama pelaku UMKM yang seringkali kesulitan dalam penambahan modal.

d. Perbaikan Infrastruktur

Infrastruktur sangat mempengaruhi proses produksi dan distribusi. Oleh karenanya perbaikan infrastruktur harus disegerakan. Tersendatnya logistik dapat meningkatkan inflasi. Karena daya saing juga sangat ditentukan cepat lambatnya keluar masuk barang.

e. Reformasi Kelembagaan dan Pemerintah

Sikap kelembagaan dan pemerintah yang kooperatif terhadap pelaku usaha merupakan salah satu hal yang harus diperbaiki.

f. Reformasi Iklim Investasi

Pemerintah Daerah harus melakukan pembenahan iklim investasi melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, menciptakan stabilitas makro ekonomi serta adanya kepastian hukum dan kebijakan serta memangkas ekonomi biaya tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dalam upaya meningkatkan daya saing industri dan perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dari Tahun 2010 sampai dengan 2018 telah melakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Dalam Rangka Peningkatan Kualitas SDM IKM/Pelaku Usaha

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dari Tahun 2010 sampai dengan 2018 telah melakukan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, pembinaan dan pengembangan orang/IKM/pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut :

a. Bidang Industri Kecil dan Kerajinan

Telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada IKM guna pengembangan sentra IKM melalui OVOP dan penumbuhan serta penembangan IKM melalui kewirausahaan yang didukung dengan beberapa kegiatan antara lain : Pelatihan Aneka Makanan se Provinsi Jambi, Pelatihan Aneka Makanan di Desa Mandiri Pangan, Pelatihan Pembuatan Cendramata, Pelatihan Pengembangan Design Batik, Pelatihan Desain Anyaman Bambu, Pelatihan Peningkatan Mutu Bordir, Pelatihan Kewirausahaan (CEFE), Pelatihan Kewirausahaan Baru Perbengkelan, Pelatihan Diversifikasi Produk Kerajinan Batu Alam dll.

b. Bidang Industri Menengah Besar

Telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada IKM yang didukung melalui beberapa kegiatan antara lain : Pelatihan Pembuatan Sparepart Kendaraan Bermotor Roda Dua dari Karet, Pelatihan Pembuatan Barang Jadi dari Latek/magang berupa aneka suku cadang karet otomotif dll.

c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha yang didukung melalui beberapa kegiatan antara lain : Pembinaan Pasar Lelang Karet dan Agro, Penguatan Kelembagaan Usaha Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian dll

d. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha/calon pelaku usaha yang didukung melalui beberapa kegiatan antara lain : Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah Produk/Komoditi Ekspor, Sosialisasi Edukasi Publik dalam rangka menghadapi MEA/AEC 2015 dll.

2. Dalam Rangka Perluasan Jaringan Pasar

Guna mendukung terciptanya perluasan jaringan pasar bagi industri dan perdagangan di Provinsi Jambi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan 2018 telah mengikuti event dan telah memberikan fasilitasi gelar produk IKM/pelaku, usaha/UKM untuk mengikuti event/pameran berskala nasional.

Dari beberapa event/pameran yang telah diikuti sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi berkerjasama dengan Dekranas Provinsi Jambi telah memperoleh penghargaan dalam Event Pameran Perhiasan Mutu Manikam Nusantara Indonesia ke 9 yang bertemakan “ *Indahnya Desain Perhiasan Tradisional Indonesia*”. Adapun penghargaan yang diraih yaitu :***Desain Tradisional Produk Perhiasan Terbaik 1 dan Stand Terbaik 1***. Penghargaan ini bukan untuk pertama kalinya kita raih, tahun-tahun sebelumnya kita juga pernah mendapatkan penghargaan di Event Pameran HUT Dekranas ke 32 Tingkat Nasional diantaranya Kriya Terbaik Unggulan Daerah melalui Produk Bros Naga, Produk Kalung Biji Semangka dan Produk Selang Batu Akik. Selain itu, prestasi gemilang yang diraih pelaku IKM Jambi yakni pada Pameran Mutumanikam Nusantara Indonesia 2012, berupa penghargaan dengan katagori “***Desain Perhiasan Tradisional Terbaik*** “ dengan judul **Kalung Rantai Sembilan** serta pada **Unesco Award Of Execent handicraft 2012** , **Incung Kincai** mendapat penghargaan untuk katagori **Excellent Filligree Work Good Finishing Of The Product**.

3. Dalam Rangka Perkuatan Sarana dan Prasarana Industri Kecil dan Menengah

Setelah melakukan pelatihan, pembinaan, pengembangan serta peningkatan kualitas IKM/pelaku usaha, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi melalui Bidang Industri Kecil dan Kerajinan telah menyalurkan sejumlah bantuan mesin dan peralatan guna memperkuat sarana dan prasarana produksi IKM/UMKM. Pada Tahun 2010 sampai dengan 2018 ini telah disalurkan sebanyak 206 unit berupa mesin dan peralatan IKM

Melalui Bidang Industri Menengah Besar, bantuan peralatan dan mesin yang telah dilaksanakan yaitu untuk industri compound di Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kab. Sarolangun dan telah dilakukan uji coba mesin yang bahan bakunya berupa sheet angin yang didatangkan dari Bandung dan Medan. Sekarang ini industri Menengah Besar sedang melakukan terobosan dengan pelatihan pembuatan sheet angin di Desa Muhajirin dan Desa Bukit Baling Kab. Muaro Jambi. Sampai saat ini telah diproduksi dan dipasarkan di Bandung.

4. Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan kepada Konsumen
 - a. Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :
 - **Pengujian Mutu Komoditi Ekspor oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)**

Dalam rangka menjamin kesesuaian mutu produk ekspor sesuai dengan permintaan negara tujuan ekspor. Sebagai UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, UPTD BPSMB mempunyai 2 laboratorium yaitu Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi. Sebagai Laboratorium Penguji telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejak tahun 1998 dengan No.LP-032-IDN dan diperpanjang setia 4 (empat) tahun dengan ruang lingkup Standar Indonesian Rubber (SIR), Cassia Indonesia, Biji kopi, Pupuk, Crude Palm Oil (CPO), Garam Konsumsi Beryodium dan Biji Pinang. Sedangkan Laboratorium Kalibrasi diakreditasi oleh KAN pada tahun 2010 ini dengan No. LK-117-IDN dengan ruang lingkup besaran suhu, massa, tekanan, panjang dan instrument analitik, gaya, volumetrik dll.

Pelaksanaan pelayanan jasa pengujian dan sertifikasi mutu barang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun perkembangan penerimaan PAD dari Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Komoditi Ekspor pada UPTD BPSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2010 -2018 sebagaimana grafik dibawah ini :
 - b. Dalam rangka tertib niaga dan perlindungan konsumen, pemerintah perlu melakukan pengawasan barang beredar dan jasa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan atau jasa. Pada tahun 2018 ini kegiatan pengawasan barang beredar ber SNI dan produk makanan dan minuman dilaksanakan di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi. Adapun objek barang dan jasa yang diawasi antara lain terhadap Produk elektronik (lampu swaballas, setrika listrik, pompa air, mesin cuci, kipas angin), barang strategis (besi beton, seng bjls, semen, garam beryodium) dan produk perlengkapan roda dua (ban dalam, ban luar, accu, velg dan helm) serta produk makanan dan minuman.

2.3. ISU-ISU PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

a. Permasalahan dan Hambatan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan.

Potensi sumber daya alam di Provinsi Jambi (cadangan hutan, kelautan dan perikanan, migas, batubara dll) sangat potensial untuk menumbuhkan kembangkan industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam. Walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam perkembangan industri dan perdagangan, namun dirasakan belum seperti yang diharapkan, hal ini disebabkan karena masih ditemuinya permasalahan yang menghambat daya saing industri dan perdagangan antara lain :

1. Kerjasama dan saling keterkaitan dalam pembinaan dan pengembangan industrialisasi perdagangan dengan para BUMN belum terprogram dan berjalan secara optimal,
2. Sarana dan Fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri dan pedagang belum memadai,
3. Tugas fungsional yang ada baik dibidang industri maupun perdagangan belum memenuhi formasi kebutuhan yang diharapkan,
4. Sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengelolaan Asset, Kekayaan daerah belum berjalan secara optimal,
5. Tingkat produktivitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal,
6. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terhadap usaha industri dan perdagangan diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas.

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka kondisi yang diharapkan untuk meminimalisir semua permasalahan dan hambatan dimaksud yaitu :

1. Optimalisasi pengembangan kerjasama dengan para BUMN dan instansi terkait dalam pembinaan industri dan pedagang dapat dilaksanakan berjalan dengan baik,
2. Berupaya meningkatkan sarana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan pembinaan serta fasilitasi kepada dunia usaha (industri dan pedagang),

3. Berupaya mendapatkan tambahan formasi tenaga fungsional (penyuluh industri kecil) serta memberdayakan tenaga fungsional yang ada secara maksimal,
4. Memberdayakan serta membangkitkan semangat kerja PNS dalam mengemban tugas pekerjaan, kreatif, inovatif, disiplin dan profesional,
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber pembiayaan yang tersedia (APBD/APBN) untuk melaksanakan program pembangunan disektor industri dan perdagangan

b. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Tantangan

1. Adanya Tupoksi dan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang jelas, terarah dan baku,
2. Adanya dukungan pembiayaan (APBN/APBD) dan kerjasama stokholders yang terkait.
3. Skim Kredit yang dialokasikan dan diperuntukkan bagi pengembangan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM),
4. Sarana dan fasilitas yang tersedia dapat didayagunakan untuk menampung, memasarkan komoditi hasil-hasil pertanian maupun produk industri pengolahan
5. Peran serta lembaga swadaya masyarakat (Dekranas, Tim Penggerak PKK) dan instansi pemerintah yang terkait didalam memajukan industri kecil dan kerajinan.

Peluang

1. Kebijakan Pemerintah Pusat dibidang industri dan perdagangan yang bersifat normatif maupun dukungan finansial dalam pelaksanaan program pembangunan industri dan perdagangan di daerah,
2. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM),
3. Potensi sumber daya alam yang memadai,
4. Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global,
5. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Jambi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar.

c. Rekomendasi dan Catatan Strategis

Agar kinerja yang dicapai dapat berkelanjutan, diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak untuk mewujudkan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas kedepan, antara lain :

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pemantapan program pembangunan dan pengembangan indag di Provinsi Jambi dan Perjanjian Kinerja dari semua unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi agar mengacu kepada sasaran strategis yang ada dalam Renstra.
2. Menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang menghambat daya saing industri dan perdagangan.
3. Membuat standarisasi/SNI diberlakukan dengan ketat (low enforcement) harus ditegakan serta perusahaan yang terus memakai produk dalam negeri harus diberi apresiasi/insentif.
4. Pembangunan industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kualitas, kuantitas dan harga yang bersaing.
5. Pemetaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai alternative pengganti barang-barang impor.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang Rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Jambi; dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah berikut pendanaan indikatif.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016-2020. RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015.

Dalam konteks perencanaan pembangunan sektor industri dan perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain dalam era globalisasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

a. URUSAN PERINDUSTRIAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perkembangan sektor industri dilaksanakan dengan tujuan memperkuat struktur ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penguatan dan pendalaman struktur industri yang terkait dengan agro industri, industri kecil dan menengah serta industri kerajinan dan rumah tangga dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pasar dalam dan luar negeri. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan dengan mengutamakan keberpihakan pada masyarakat dan memperkuat keterkaitan serta saling mendukung antara industri dan pertanian yang ditunjang dengan sektor jasa dan kualitas SDM. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan pengembangan industri dapat lebih efisien dengan wawasan kemasa depan yang dapat menghasilkan produk yang berkualitas dandaya saing tinggi.

b. URUSAN PERDAGANGAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan

ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Program pengembangan perdagangan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan sistem perdagangan dalam negeri yang efisien, perlindungan terhadap konsumen dan pengembangan perdagangan luar negeri dalam rangka peningkatan ekspor serta pengendalian impor, tujuan ini sangat erat hubungannya dengan upaya memperkuat pemantapan struktur ekonomi daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAMKEGIATAN

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

A. SEKTOR INDUSTRI

1. Arah Kebijakan Industri Nasional

Secaranasional, sektor Industri telah menjadi tulang punggung perekonomian bangsa, yang diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian sebagai basis kekuatan ekonomi dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka menentukan arah dan kebijakan pembangunan industri nasional di masa yang akan datang, Pemerintah telah mengeluarkan **Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional**, yang didalamnya diatur mengenai pemberian fasilitas berupa insentif fiskal dan non fiskal, dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pengusaha industri tertentu, seperti industri prioritas tinggi, industri pionir, industri yang dibangun di daerah terpencil dan sebagainya.

Kemampuan industri mikro dan kecil belum memadai untuk dapat digunakan basis penumbuhan populasi industri berskala besar dan sedang. Sehingga pengungkit utama akselerasi pertumbuhan industri adalah investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) ataupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Untuk menarik investasi, maka kebijakan dalam pembangunan industri adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan perwilayaan industri di luar pulau jawa, dengan focus (a). Wilayah pusat pertumbuhan industri terutama di koridor ekonomi, (b). Kawasan Peruntukan Industri, (c). Kawasan Industri, (d). Sentra IKM.
- b. Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9.000 unit usaha industri berskala besar dan sedang serta tumbuhnya industri kecil sekitar 20 ribu unit usaha.
- c. Peningkatan daya saing dan produktifitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja).

2. Arah Kebijakan Kementerian Perindustrian

Arah Kebijakan pengembangan industri nasional yang dituangkan dalam Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019 mencakup beberapa hal pokok antara lain :

- a. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sector industri dalam perekonomian nasional.

- b. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah.
- c. Meningkatkan industri kecil dan menengah agar terkait dan lebih seimbang dengan kemampuan industri berskala besar.
- d. Mendorong pertumbuhan industri di pulau jawa
- e. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lain dalam mendukung pembangunan industry nasional.

B. SEKTOR PERDAGANGAN

1. Arah Kebijakan Perdagangan Nasional

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 serta bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat

2. Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2014-2019 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2014-2019. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

a. Arah Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri

Arah kebijakan perdagangan dalam negeri tahun 2015-2019 adalah meningkatkan aktifitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan melalui ;

- (1) Pembenahan system distribusi bahan pokok dan system logistik rantai pasok agar lebih efisien dan lebih handal serta pemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorong peningkatan produktifitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- (2) Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif.

- (3) Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk local di pusat dan di daerah.

b. Arah Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran perdagangan luar negeri tahun 2015-2019 adalah memperkuat daya saing ekspor produk non migas dan jasa bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) pilar strategi yaitu :

- (1). Menjaga dan meningkatkan pangsa pasar produk Indonesia di pasar ekspor utama.
- (2) Meningkatkan pangsa pasar ekspor di pasar prospektif
- (3) Mengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dan jasa potensial
- (4) Meningkatkan fasilitas ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk nasional.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam rancangan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi periode 2016-2020 yaitu :

1. Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah.
2. Meningkatkan stabilitas dan penguatan pangsa pasar yang terintegrasi dengan pasar dalam negeri.
3. Meningkatkan perdagangan luar negeri yang berkualitas
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha.

B. SASARAN

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan yang ingin diwujudkan sebagaimana yang ***akan diamanatkan dalam rancangan Rencana Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi periode 2016-2020 sebanyak 4 sasaran*** yaitu :

1. ***" Tumbuh dan berkembangnya sektor industri"*** (Sasaran Strategis 1)

Tumbuh dan berkembangnya sektor industri selain sebagai sektor penggerak utama peningkatan nilai tambah komoditi primer utama Provinsi Jambi juga sebagai pendukung penggerak utama perekonomian daerah. Fasilitasi pengembangan,

penyebaran dan penguatan daya saing industri daerah menjadi sasaran yang sangat penting dan krusial. Untuk itu peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penumbuhan sektor industri khususnya penumbuhan wirausaha baru menjadi perhatian utama.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis 1 yaitu :

- (1) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
- (2) Laju pertumbuhan sektor industri
- (3) Jumlah usaha industri
- (4) Jumlah penyerapan tenaga kerja industri
- (5) Jumlah nilai produksi industri
- (6) Jumlah nilai investasi yang tertanam di industri
- (7) Jumlah pelaku usaha industri yang dibina dan dilatih
- (8) Jumlah bantuan peralatan yang diberikan kepada pelaku usaha industri
- (9) Jumlah sentra usaha industri kecil yang dibina

2. Sasaran Strategis 2 terdiri atas 2 yaitu :

a. ***"Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri yang Didukung Pengamanan Perdagangan Daerah"*** (Sasaran Strategis 2-1)

Sistem distribusi perdagangan dalam negeri yang efisien akan nyata berpengaruh padadaya saing produk dari sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran di dalam maupun diluar daerah. Untuk itu upaya-upaya dalam rangka mengendalikan inflansi, perluasan akses pasar produk baik produk industri maupun non industri dan pengembangan sarana perdagangan menjadi lebih krusial.

Pengamanan perdagangan juga dapat menjadikan instrument untuk mengembangkan ekonomi lokal. Tindakan pengamanan perdagangan perlu disenergikan dengan tindakan Aku Cinta Produk Lokal dan Gerakan Konsumen Cerdas akan memacu potensi ekonomi lokal menjadi pesat berkembang,

Adapun indikator kinerja sasaran strategis 2-1 yaitu :

- (1) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
- (2) Laju pertumbuhan sektor perdagangan
- (3) Jumlah usaha perdagangan
- (4) Rasio peningkatan transaksi lelang agro
- (5) Jumlah ketersediaan kebutuhan bahan pokok yang terpantau

b. ***"Peningkatan Kesadaran Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Perlindungan Konsumen "*** (Sasaran Strategis 2-2)

Sistem distribusi yang efisien harus disertai dengan sistem perlindungan konsumen terhadap kepastian dan keamanan barang yang dibeli terlebih dengan banjirnya produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Penguatan upaya perlindungan tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kepada dunia usaha. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kabupaten/Kota akan menjadi alat krusial bagi pengamanan perdagangan.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis 2-2 yaitu :

- (1) Jumlah Barang Beredar Ber SNI yang diawasi
- (2) Jumlah wajib tera/tera ulang
- (3) Jumlah BPSK yang terbentuk

3. ” **Meningkatkan Ekspor Daerah dan Terkendalinya Impor**” (Sasaran Strategis 3)

Ekspor dan Impor merupakan salah satu komponen utama dalam PDRB Provinsi Jambi. Aktivitas pengembangan ekspor daerah perlu digenjot guna untuk mengatasi defisit neraca perdagangan daerah yang dapat berpengaruh negatif pada perekonomian nasional khususnya daerah. Pemerintah dan pelaku usaha harus bersinergis untuk mendorong ekspor komoditi unggulan daerah yang potensial untuk dikembangkan. Sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian melalui pertambahan nilai ekspor.

Selanjutnya pengendalian impor perlu dilakukan untuk masuknya barang-barang konsumsi yang tidak layak dan berbahaya bagi konsumen juga kaitannya dengan pengamanan produk-produk dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat akibat masuknya produk serupa dari luar negeri yang asal dan kualitasnya tidak dapat terjamin.

Pembinaan perdagangan lintas batas menjadi salah satu fokus lokasi pengembangan ekspor dan pengendalian impor karena di daerah ini berbagai masalah berkaitan dengan perdagangan ilegal yang sering muncul. Pengendalian Impor dapat dikendalikan dengan instrumen penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan pemantauan masuknya barang-barang impor melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Pengembangan ekspor dan pengendalian impor di Provinsi Jambi harus didukung dengan institusi daerah yang memberikan pelayanan kepada dunia usaha terhadap pemberlakuan standarisasi dunia.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis 3 yaitu :

- (1) Nilai ekspor bersih perdagangan
- (2) Jumlah calon eksportir baru
- (3) Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan

- (4) Jumlah pengujian mutu produk ekspor
- (5) Jumlah kalibrasi alat laboratorium
- (6) Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pengujian mutu produk ekspor
- (7) Jumlah PAD atas pelayanan pengujian mutu produk ekspor

4. ” **Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi**”
(Sasaran strategis 4)

Peningkatan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi adalah salah satu faktor pendukung pencapaian sasaran strategis lainnya. Pembinaan kemampuan dan kompetensi disiplin pegawai menjadi prioritas utama untuk mendapat hasil kinerja yang optimal. Disperindag Provinsi Jambi bersama dengan UPTD dibawahnya yang langsung bergerak pada pelayanan dunia usaha dan masyarakat harus didukung dengan peningkatan kompetensi aparatur yang profesional dan responsif terhadap dinamika di dunia usaha dan masyarakat. Tidak saja sistem manajemen kepegawaian yang baik, fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja harus disediakan termasuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas.

Hal lain yang tak kalah penting adalah perencanaan. Perencanaan kerja yang baik akan sangat membantu pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Demikian juga pengelolaan keuangan negara dimana pengelolaan keuangan negara yang baik dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan yang berlaku dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Segala sesuatu pelaksanaan kegiatan diperlukan adanya monitoring dan evaluasi sehingga lebih tepat dan berdaya guna.

Adapun indikator kinerja sasaran 4 yaitu :

- (1) Operasional pelayanan kantor
- (2) Jumlah dokumen perencanaan industri dan perdagangan
- (3) Jumlah Forum Sinergi Pengembangan industri dan perdagangan
- (4) Peningkatan SDM Aparatur industri dan perdagangan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2018 ini program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Jambi terdiri dari 13 program (6 program rutin dan 7 program pilihan/prioritas), sedangkan kegiatan sebanyak 64 kegiatan (27 kegiatan rutin dan 37 kegiatan pilihan/prioritas).

Pagu anggaran Dinas Perindag Provinsi Jambi setelah dirasionalisasi sebesar Rp. 12.605.000.000,-. Pagu tahun 2018 ini mengalami peningkatan sebesar 67,13 % bila dibandingkan dengan pagu anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 8.462.963.717,- Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

A. Urusan Rutin

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 11 kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

II. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 8 kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pengadaan Meubeler
4. Pengadaan Komputer
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Pembinaan Jasmani dan Rohani

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2. Penyusunan laporan Keuangan dan Neraca Aset
3. Penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian
4. Penyusunan rencana kerja SKPD
5. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD
6. Pengembangan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

Tabel 1. Program dan Kegiatan Rutin Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Jumlah Anggaran
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.384.123.500,00
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar pertahun	3.100 bh	72.300.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Pembayaran Rekening Listrik, Telpon, PAM, Internet	12 bulan	246.000.000
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	41 orang	191.000.000
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	12 bulan	113.356.000
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	53 jenis	93.863.000
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	2 Item	32.500.000
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 jenis	68.902.000
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	3 Item	7.000.000
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	60 ekspl	16.200.000
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat/pertemuan	530 Ok	25.728.000
11.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	40 Oh	516.275.500
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur	100 %	1.320.618.045,00
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	9 unit	201.590.000
2.	Pengadaan Moubeler	Jumlah pengadaan peralatan Moubeler	1 item	17.500.000
3.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	5 item	295.500.000
4.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	49 unit	216.020.000
5.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan elektronika	120 unit	104.000.000
6.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah rehab dan penambahan ruang/gedung kantor	9 paket	397.8500.000
7.	Pengadaan komputer	Jumlah pengadaan peralatan komputer	2 Item	41.588.000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100 %	194.400.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	162 stel	194.400.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas dibidangnya	100 %	58.130.000
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti	6 Kali	20.000.000
2.	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah pelaksanaan senam dan pembinaan rohani	12 kali	38.130.000
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	100 %	648.497.075,00

1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Perindag Prov. Jambi	4 dokumen	34.680.000
2.	Penyusunan Laporan Keuangan dan Inventarisasi Aset	Jumlah Laporan Keuangan dan Neraca Aset Dinas Perindag Prov. Jambi	4 dokumen	27.875.000
3.	Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian Dinas Perindag Prov. Jambi	5 dokumen	44.000.000
4.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	- Jumlah rencana kerja selama 1 tahun - Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan SKPD	6 dokumen	199.815.000
5.	Monitoring dan Evaluasi Program /Kegiatan SKPD	Periode monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	12 bulan	97.822.075
6.	Pengembangan Sarana Informasi yang Dapat Di Akses Masyarakat	Periode informasi perkembangan industri dan perdagangan di Provinsi Jambi	12 bulan	244.305.075
JUMLAH PROGRAM RUTIN				3.605.768.620,00

B. Urusan Pilihan

I. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

1. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
2. Pengembangan dan pembinaan badan sengketa konsumen
3. Monitoring Barang yang Kadaluarsa di Pasaran
4. Sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga
5. Survey IKM terhadap pelayanan konsumen
6. Identifikasi tertib niaga

II. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 9 kegiatan yaitu :

1. Peningkatan SDM Industri Kecil dan Menengah
2. Promosi Industri Kecil Regional dan Lokal
3. Penguatan Kelembagaan Industri Keci
4. Pengembangan Rumah Tenun Jambi
5. Pendataan IKM se Provinsi Jambi
6. Pengembangan Perajin Unit Promosi Jambi
7. Pengembangan Desain Kerajinan Berbasis Budaya Daerah
8. Pengembangan Sentra Usaha Industri Kecil
9. Konveksi gugus kendali mutu tingkat Provinsi

III. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

1. Peningkatan dan pembinaan usaha industri

IV. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

1. Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Sistem Resi Gudang
2. Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri
3. Pendataan Sarana Perdagangan dan Pedagang Informal
4. Rantai pasok dan pronoksa bahan pokok dan bahan penting

V Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

1. Pengembangan dan pembinaan wirausaha baru industri kecil
2. Pelatihan TOT bagi para aparat pembina IKM
3. Pengembangan one village one product (OVOV)

VI. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

1. Pengawasan teknis pengembangan industri menengah dan besar
2. Penguatan kelembagaan industri menengah dan besar
3. Peningkatan SDM industri menengah dan besar
4. Partisipasi pada pameran industri menengah dan besar
5. Updating industri menengah dan besar se provinsi jambi

VII. Program Pengembangan Standarisasi Nasional

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

1. Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi
2. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Barang Ekspor dan Import
3. Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang sudah terakreditasi
5. Penambahan peralatan dan bahan uji serta perawatan Laboratorium
6. Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB
7. Survey IKM atas Pelayanan Lab. Kalibrasi dan Lab. Pengujian

VII. Program Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

1. Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri
2. Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah
3. Pemuktahiran data ekspor dan importir

Tabel 2. Program dan Kegiatan Pilihan/ Strategis Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2016

No.	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Jumlah Anggaran
I.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Tumbuhnya unit usaha Industri Kecil dan Menengah	2 %	865.320.000,00
1.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah produk yang ber-SNI wajib dan barang strategis yang diawasi	9 Produk	206.320.000
2.	Pengembangan dan pembinaan badan sengketa konsumen	Jumlah pembinaan BPSK dan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen	30 Sidang 3 Kab/Kota	350.000.000
3.	Monitoring barang yang kadarluarsa di pasaran	Jumlah periode pengawasan terhadap barang yang kadarluarsa	2 kali	56.450.000
4.	Sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen	2 kali	136.300.000
5.	Survey IKM terhadap perlindungan konsumen	Jumlah responden survey	150 Orang	24.900.000
6.	Identifikasi tertib niaga	Jumlah data tentang pelaku usaha	30 Perusahaan	91.350.000
II.	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pengembangan wirausaha baru IKM	2 wira usaha baru	2.661.814.000
1.	Peningkatan SDM industri kecil dan menengah	Jumlah pelatihan yang diikuti perajin IK dalam rangka peningkatan SDM	1 kali	89.810.000
2.	Promosi industri kecil regional dan lokal	Jumlah promosi industri kecil yang diikuti	11 Kali	737.225.000
3.	Penguatan kelembagaan industri kecil	Jumlah peralatan yang diberikan/mesin yang diberikan kepada industri kecil	2 Alat/Mesin	161.294.000
4.	Pengembangan rumah tenun Jambi	Jumlah periode sarana dan prasarana rumah tenun	12 bulan	258.300.000
5.	Pendataan IKM se Provinsi Jambi	Jumlah lokasi pendataan IKM	11 Lokasi	79.080.000
6.	Pengembangan perajin unit promosi Jambi	Fasilitas pengembangan perajin Jambi Rapat koordinasi Festival/lomba kuliner daerah Jambi Festival/lomba perhiasan khas jambi Festival lomba batik Festival/lomba handrft	12 Bulan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali	365.400.000
7.	Pengembangan desain kerajinan berbasis budaya daerah	Meningkatkan daya saing desain busana jambi Pelatihan pewarnaan alam atau shoft Desain batik/songket berbasis budaya jambi	1 Kali 1 Kali 1 Kali	745.450.000
8.	Pengembangan Sentra usaha industri kecil	Jumlah sentra usaha industri keci yang dibina	1 Sentra	126.790.000
9.	Konvensi gugus kendali mutu tingkat provinsi	Jumlah GKM-IKM dan fasilitator berprestasi Provinsi Jambi yang mewakili tingkat nasional	2 Kelompok	98.465.000
III	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pembinaan usaha industri		734.557.060
1.	Peningkatan pembinaan usaha industri	Jumlah pembinaan industri kopi	2 Mesin inovasi kopi	734.557.060
IV.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan	2 %	861.900.000
1.	Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Sistem Resi Gudang	Jumlah pelaksanaan Pasar Lelang Agro Jumlah peserta sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang perdagangan dalam negeri Jumlah peserta pelatihan pengawasan/verifikator mutu bokar	2 kali 225 Orang 20 Orang	188.400.000
2.	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pameran dalam negeri Jumlah Sosialisasi penggunaan produk dalam negeri Jumlah partisipasi pada pawai kendaraan hias Jumlah paket sembako	3 kali 1 kali 1 kali 10.000 Paket	323.000.000
3.	Pendataan Sarana Perdagangan dan Pedagang Informal	Jumlah pelaksanaan pendataan sarana perdagangan dan data pedagang kecil informal se Provinsi Jambi	10 Buku	43.300.000
4.	Pemantauan Stok Bahan Pokok dan bahan penting lainnya	Dokumen hasil pronogsa 2018 Jumlah distribusi terdaftar Distribusi yang mengikuti temu usaha	75 Perusahaan 75 Distributor 50 Orang	307.200.000
V.	Program peningkatan daya saing	Jumlah Pengembangan dan		281.093.500

	kewirausahaan industri kecil dan menengah	pembinaan wirausaha baru industri kecil		
1.	Pengembangan dan pembinaan wirausaha baru industri kecil	Jumlah Pengembangan dan pembinaan wirausaha baru industri kecil	2 Kegiatan	177.220.000
2.	Pelatihan TOT bagi para aparat pembina IKM	Jumlah yang mendapat pelatihan TOT	25 IKM	48.620.000
3.	Pengembangan One Village one Product (OVOP)	Berkembangannya One Village one Product (OVOP) sentra provinsi jambi Pengembangan produk unggulan kab/kota	1 Kali 1 kali	55.253.500
VI.	Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia	Tumbuhnya unit usaha baru Industri Agro dan Kimia	2 %	2.593.019.820
1.	Pengawasan teknis pengembangan industri menengah besar	Terlaksananya pengawasan teknis pengembangan agro kimia dan aneka	20 Perusahaan	130.627.320
2.	Penguatan kelembagaan industri menengah dan besar	Jumlah bantuan peralatan yang diberikan kepada pelaku usaha industri menengah dan besar	1 Mesin	1.817.850.000
3.	Peningkatan SDM Industri Menengah dan Besar	Jumlah pelaku yang meng ikuti BIMTEK Bertambahnya SDm yang bersertifikat	5 orang 5 Orang	67.715.000
4.	Partisipasi pada Pameran Industri Menengah dan Besar	Jumlah pameran industri menengah yang diikuti Bertambahnya wawasan jumlah pelaku usaha difasilitasi mengikuti pameran	1 Luar provinsi Jambi 5 Orang	112.750.000
5.	Updating industri menengah dan besar se provinsi Jambi	Dokumen rencana induk pembangunan industri provinsi jambi	5 Dokumen	464.077.500
VII.	Program Pengembangan Standarisasi Nasional	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu produk ekspor	5 %	822.027.000
1.	Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi	Periode pemeliharaan dan penggantian suku cadang alat laboratorium	12 bulan	95.400.000
2.	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Ekspor dan Impor	- Jumlah penambahan ruang lingkup dan Pemeliharaan akreditasi Lab. BPSMB - Jumlah pengawasan dan pengendalian mutu barang SNI wajib di pasaran	12 blan 8 kali	227.950.000
3.	Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang Sudah Terakreditasi	Jumlah sosialisasi lab kalibrasi yang sudah terakreditasi	11 Kab/Kota	53.500.000
4.	Penambahan Peralatan dan bahan Uji serta Perawatan laboratorium	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan uji serta perawatan laboratorium	24 jenis	363.252.000
5.	Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan SDM petugas kalibrasi BPSMB	10 orang	44.225.000
6.	Survey IKM atas Pelayanan Lab. Kalibrasi dan Lab. Pengujian	Jumlah responden yang disurvei atas IKM terhadap Pelayanan Lab. Kalibrasi dan Lab. Pengujian	53 responden (perusahaan)	37.700.000
VIII.	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Nilai ekspor bersih perdagangan		179.500.000
1.	Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kompotensinya di bidang ekspor	4 Orang	27.500.000
2.	Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah	Jumlah aparatur yang ditingkan kompetensinya dibidang ekspor	100 Orang	97.000.000
3.	Pemuktahiran data ekspor dan impotir	Jumlah aparatur yang ditingkan kompetensinya dibidang ekspor	2 Buku	55.000.000
TOTAL PROGRAM/KEGIATAN PILIHAN/STRATEGIS				8.999.231.380

Tabel 14. Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

No.	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	URUSAN RUTIN				4.856.250.000				5.099.234.000
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertibnya Administrasi Perkantoran		100%	1.567.000.000	APBD I		100%	1.793.000.000
	Kegiatan :								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Prov. Jambi	12 bulan	70.000.000			12 bulan	80.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prov. Jambi	12 bulan	400.000.000			12 bulan	450.000.000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran tenaga administrasi keuangan	Prov. Jambi	12 bulan	155.000.000			12 bulan	175.000.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Prov. Jambi	12 bulan	100.000.000			12 bulan	110.000.000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Prov. Jambi	12 bulan	110.000.000			12 bulan	140.000.000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Prov. Jambi	12 bulan	45.000.000			12 bulan	65.000.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor	Prov. Jambi	12 bulan	90.000.000			12 bulan	100.000.000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Prov. Jambi	3 item	10.000.000			3 item	50.000.000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar harian/warta perundang-undangan	Prov. Jambi	12 bulan	21.000.000			12 bulan	15.000.000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya konsumsi untuk pelaksanaan rapat/pertemuan	Prov. Jambi	860 ok	16.000.000			900 ok	18.000.000
11	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya komunikasi dan koordinasi dengan stake holder	Prov. Jambi	12 bulan	500.000.000			12 bulan	525.000.000
12	Penataan dan Pemeliharaan Arsip Perpustakaan	Tertatanya dan terpeliharanya arsip perpustakaan	Prov. Jambi	12 bulan	15.000.000			12 bulan	25.000.000
13	Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	Prov. Jambi	2 jasa	35.000.000			2 jasa	40.000.000
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur		100%	2.270.000.000	APBD I		100%	2.297.234.000
	Kegiatan :								
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas	Prov. Jambi	5 unit	450.000.000			4 unit	250.000.000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Prov. Jambi	12 item	100.000.000			12 item	125.000.000
3	Pengadaan Meubeler	Terlaksananya pengadaan peralatan meubeler	Prov. Jambi	4 item	150.000.000			4 item	175.000.000

4	Pengadaan Komputer	Terlaksananya pengadaan peralatan komputer	Prov. Jambi	4 item	120.000.000			4 item	150.000.000
5	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Prov. Jambi	2 item	100.000.000			2 item	150.000.000
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Prov. Jambi	47 unit	350.000.000			52 unit	387.234.000
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan elektronika	Prov. Jambi	106 unit	50.000.000			118 unit	60.000.000
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab dan penambahan ruang/gedung kantor	Prov. Jambi	14 paket	950.000.000			14 paket	1.000.000.000
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur		100%	157.250.000	APBD I		100%	160.000.000
	Kegiatan :								
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian, pakaian kerja dan pakaian olah raga	Prov. Jambi	412 stel	157.250.000			415	160.000.000
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas dibidangnya		100%	111.000.000	APBD I		100%	115.000.000
	Kegiatan :								
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Prov. Jambi	24 kali	96.000.000			24 kali	96.000.000
2	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya kegiatan senam dan pembinaan rohani	Prov. Jambi	24 kali	15.000.000			24 kali	20.000.000
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	381.000.000	APBD I		100%	401.000.000
	Kegiatan :								
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dinas Perindag Prov. Jambi	Prov. Jambi	75 buku	40.000.000			75 buku	40.000.000
2	Penyusunan Laporan Keuangan dan Inventarisasi Aset	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Neraca Aset Dinas Perindag Prov. Jambi	Prov. Jambi	90 buku	60.000.000			100 buku	70.000.000
3	Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Kepegawaian Dinas Perindag Prov. Jambi	Prov. Jambi	50 buku	60.000.000			60 buku	70.000.000
4	Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Bidang Akuntabel dan Manajemen Kinerja	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pelayanan Dinas Perindag Provinsi Jambi	Prov. Jambi	24 orang	96.000.000			24 orang	96.000.000
5	Pengembangan Sarana Informasi yang Dapat Di Akses Masyarakat	Terinformasinya perkembangan industri dan perdagangan di Provinsi Jambi	Prov. Jambi	12 bulan	125.000.000			12 bulan	125.000.000
VI.	Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Ketersediaan informasi tentang rencana kerja dan penganggaran Disperindag Prov. Jambi		100%	370.000.000	APBD I		100%	390.000.000
	Kegiatan :								
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	- Tersusunnya rencana kerja selama 1 tahun - Terlaksananya rapat koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan	Prov. Jambi	120 buku 1 kali	250.000.000			120 buku 1 kali	260.000.000
2	Monitoring dan Evaluasi Program /Kegiatan SKPD	Termonitornya dan terevaluasinya progam dan kegiatan yang telah dilaksanakan	Prov. Jambi	11 Kab/Kota	120.000.000			11 Kab/Kota	130.000.000
B.	URUSAN PILIHAN				9.855.000.000				11.660.000.000

VII.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya unit usaha baru, produk IKM dan meluasnya diversifikasi jenis produk		100%	3.140.000.000	APBD I		100%	3.445.000.000
	Kegiatan :								
1	Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Unggulan Daerah - Pembuatan Nata Decoco - Pembuatan aneka kripik - Pengolahan aneka makanan daerah	Diversifikasi olahan aneka makanan unggulan daerah	Tanjabt Tanjabt Merangin, Kerinci Tanjabbar	5 kali/115 org 1 kali / 25 org 1 kali / 25 org 3 kali / 65 org	230.000.000 50.000.000 50.000.000 130.000.000			5 kali/125 org	250.000.000
2	Peningkatan SDM Industri Kecil dan Menengah - Pelatihan pengolahan limbah - Pelatihan jahit, border, songket - Pelatihan manajemen dan cara berproduksi yang berorientasi pasar - Pelatihan pengolahan serat nenas - Pelatihan peningkatan SDM IK	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan ketrampilan perajin IK	Kota Jambi Kota Jambi, Ma. Jambi Batanghari Tanjabar, Sei. Penuh Ma. Jambi Sarolangun, Tebo, Bungo	10 kali/ 235 org 1 kali / 25 org 1 kali / 25 org 1 kali / 25 org 1 kali / 25 org 2 kali / 50 org 1 kali / 25 org 3 kali / 60 org	395.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 75.000.000 40.000.000 120.000.000			11 kali/260 org	450.000.000
3	Promosi Industri Kecil Regional dan Lokal	Meningkatnya pemasaran dan promosi produk IK Provinsi Jambi	Dalam dan Luar Prov. Jambi	11 kali	560.000.000			12 kali	600.000.000
4	Penguatan Kelembagaan Industri Kecil • Pembinaan IK dan KUB • Bantuan peralatan/bahan untuk IK : - Bahan kemasan - Mesin Jahit - Mesin pemintal serat nenas - Mesin pengisar, penggiling daging dan pengemas kerupuk udang - Peralatan kripik pisang - Mesin giling kedelai - Mesin pengupas kulit ari kedelai dan penyaring susu kedelai - Mesin cetak dan adonan mie - Peralatan industri kacang tojin	Meningkatnya SDM Kelembagaan KUB dan IK serta teratasinya kebutuhan peralatan yang dihadapi IKM	11 Kab/Kota Kota Jambi Ma. Jambi Kerinci Ma. Jambi Tanjabt Tanjabt Merangin Merangin Ma. Bungo Kota Sei. Penuh	2 sub kegiatan 11 kali 1 paket 6 unit 10 unit 12 unit 12 unit 1 unit 2 paket 5 unit 5 paket	620.000.000 75.000.000 50.000.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 20.000.000 25.000.000 80.000.000 10.000.000 100.000.000			2 sub kegiatan	700.000.000
5	Pengembangan Rumah Tenun Jambi	Fasilitasi sarana dan prasarana rumah tenun dan sulaman	Prov. Jambi	12 bulan	290.000.000			12 bulan	300.000.000
6	Pendataan IKM se Provinsi Jambi	Terdapatnya data IKM se Provinsi Jambi	11 Kab/Kota	11 kali	120.000.000			11 Kab/Kota	140.000.000

7	Pengembangan Perajin Unit Promosi Jambi	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan perajin dalam pengelolaan usaha dan managemennya	Prov. Jambi	12 bulan	450.000.000			12 bulan	500.000.000
8	Peningkatan Kualitas Aneka Produk Industri Kecil	Meningkatnya mutu aneka produk IK	3 Kab/Kota	3 kali/90 orang	150.000.000			3 kali/90 orang	160.000.000
9	Pengembangan Desain Kerajinan Berbasis Budaya Daerah • Pembuatan Katalog warna batik • Pembuatan HAKI Motif Batik	Diversifikasi Desain Kerajinan Berbasis Budaya Daerah	Kota Jambi Sarolangun	3 sub kegiatan 1 kali/25 org 1 kali	100.000.000 40.000.000 60.000.000			3 sub kegiatan 1 kali/25 org 1 kali	120.000.000 40.000.000 60.000.000
10	Pengembangan Sentra Usaha Industri Kecil	Terbinanya sentra usaha industri kecil	Kab atau Kota	1 lokasi	100.000.000			1 lokasi	100.000.000
11	Temu Bisnis Pelaku IKM	Terlaksananya Temu Bisnis Pelaku IKM	Prov. Jambi	1 kali/ 30 orang	50.000.000			1 kali/ 30 orang	50.000.000
12	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan IKM	Termonitornya dan terevaluasinya permasalahan IKM	11 Kab/Kota	11 kali	75.000.000			11 kali	75.000.000
VIII.	Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah	Tumbuhnya kewirausahaan IKM baru		100%	250.000.000	APBD I		100%	325.000.000
	Kegiatan :								
1	Pengembangan dan Pembinaan Wira Usaha Baru Industri Kecil	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Wira Usaha Baru Industri Kecil	2 Kab/Kota	2 wira usaha baru	150.000.000			2 wira usaha baru	150.000.000
2	Pelatihan TOT Bagi Aparat Pembina IKM	Peningkatan pengetahuan TOT bagi aparat pembina IKM	Prov. Jambi	2 kali/ 60 orang	100.000.000			2 kali/ 60 orang	100.000.000
3	Pengembangan OVOP	Terlaksananya pengembangan produk IK di suatu lokasi dengan 1 produk	-	-	-			1 lokasi	75.000.000
IX.	Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia	Meningkatnya unit usaha baru, meningkatnya produk Industri Agro dan Kimia dan meluasnya diversifikasi jenis produk IAK		100%	900.000.000	APBD I		100%	1.000.000.000
	Kegiatan:								
1	Sosialisasi Pengolahan Industri Berbasis Agro	Terlaksananya Sosialisasi Pengolahan Industri Berbasis Agro	Prov. Jambi	1 kali	50.000.000			1 kali	50.000.000
2	Pelatihan Aneka Hilirisasi Industri Agro dan Kimia	Terlaksananya Pelatihan Aneka Hilirisasi Industri Agro dan Kimia	3 Kab/Kota	3 sub kegiatan	150.000.000			3 sub kegiatan	150.000.000
3	Pengawasan Teknis Pengembangan AMDK dan Kompon	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pengembangan AMDK dan Kompon	8 Kab/Kota	10 perusahaan	50.000.000			10 perusahaan	50.000.000
4	Pelatihan Peningkatan Mutu Hilirisasi Industri Agro dan Kimia	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu Hilirisasi Industri Agro dan Kimia	Ma. Jambi	2 sub kegiatan	100.000.000			2 sub kegiatan	100.000.000
5	Penguatan Kelembagaan Industri Menengah dan Besar	Meningkatnya Kelembagaan Industri Menengah dan Besar	Ma. Jambi Sarolangun	2 sub kegiatan	300.000.000			2 sub kegiatan	400.000.000
6	Peningkatan SDM Industri Menengah dan Besar	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan SDM IMB	Luar Prov. Jambi	6 orang	50.000.000			6 orang	50.000.000
7	Partisipasi pada Pameran Industri Menengah dan Besar	Promosi hasil industri menengah dan besar	Luar Prov. Provinsi Jambi	1 kali	200.000.000			1 kali	200.000.000
X.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok		100%	1.805.000.000	APBD I		100%	1.700.000.000

		masyarakat							
	Kegiatan :								
1	Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Sistem Resi Gudang	Peningkatan mutu pelaksanaan Pasar Lelang Agro dan Pembinaan terhadap Pasar Lelang Karet serta system resi gudang	Prov. Jambi dan 11 Kab/ Kota	3 sub kegiatan	400.000.000			3 sub kegiatan	400.000.000
2	Penguatan Kelembagaan Usaha Dagang Kecil Informal - Sosialisasi kewirausahaan untuk usaha dagang kecil informal - Sosialisasi dan Fasilitasi HAKI dan Produk Halal - Magang Pelaku Usaha Kecil Informal	Peningkatan kinerja kelembagaan usaha dagang informal dan terbantunya peralatan yang dibutuhkan pedagang kecil informal	Prov. Jambi Prov. Jambi Luar Prov. Jambi	3 sub kegiatan	300.000.000			4 sub kegiatan	450.000.000
3	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dikenalnya produk unggulan IKM Provinsi Jambi di berbagai daerah	Dalam dan Luar Prov. Jambi	3 sub kegiatan	375.000.000			3 sub kegiatan	400.000.000
4	Penyelenggaraan Pasar Murah	Terlaksananya pelaksanaan pasar murah dengan pemelian kebutuhan barang kebutuhan pokok bersubsidi	6 Kab/Kota	6 kali / 9.000 paket	300.000.000			6 kali / 9.000 paket	300.000.000
5	Pengolahan Entry Data SIUP dan TDP	Terentrinya Data SIUP dan TDP		12 bulan	80.000.000			12 bulan	80.000.000
6	Pendataan Sarana Perdagangan dan Pedagang Informal	Tersedianya dara sarana perdagangan dan data pedagang kecil informal se Provinsi Jambi	11 Kab/Kota	2 sub Kegiatan	95.000.000			2 sub Kegiatan	100.000.000
7	Pemantauan DAK Sarana Perdagangan	Pengawasan terhadap pelaksanaan DAK sarana perdagangan	Kab. Penerima Dana DAK	Kab/Kota	75.000.000			Kab/Kota	75.000.000
8	Pemantauan Stok Bahan Pokok di Tingkat Distributor dan Pasar Tradisional	Pengawasan terhadap ketersediaan Stok Bahan Pokok di Tingkat Distributor dan Pasar Tradisional	Kota Jambi	12 bulan	75.000.000			12 bulan	75.000.000
XI.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan / hak konsumen		100%	1.245.000.000	APBD I		100%	1.435.000.000
	Kegiatan :								
1	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Termonitornya peredaran barang yang ber SNI wajib dan strategis di pasaran	11 Kab/Kota	9 produk	140.000.000			9 produk	140.000.000
2	Pengembangan Infrastruktur Lembaga Laboratorium Kemetrolagian	Kompetensi pelayanan laboratorium kemetrolagian	Prov.Jambi	12 bulan	110.000.000			12 bulan	120.000.000
3	Kalibrasi dan Verifikasi Peralatan Standar Laboratorium Kemetrolagian	Sertifikasi peralatan standard dan ukuran standard	Prov.Jambi	20 unit	110.000.000			25 unit	150.000.000
4	Tera/Tera Ulang Alat UTTP Kemetrolagian	Terciptanya tertib niaga dan ukur alat UTTP	11 Kab/Kota	16.000 UTTP	575.000.000			16.500 UTTP	600.000.000
5	Pengawasan UTTP dan BDKT	Terkontrolnya alat UTTP dan BDKT di pasaran	Prov.Jambi	8.000 unit	80.000.000			8.000 unit	80.000.000
6	Pengembangan dan Pembinaan Badan	Terlaksananya Pembinaan Badan	11Kkab/Kota	11 kali	75.000.000			11 Kab/Kota	75.000.000

	Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)							
7	Peningkatan SDM Petugas Penera	Meningkatnya kinerja SDM petugas tera	Luar Prov. Jambi	10 orang	65.000.000			10 orang	75.000.000
8	Survey IKM atas Pelayanan Tera/Tera Ulang alat UTTP	Dilaksanakannya survey IKM atas pelayanan tera/tera ulang alat UTTP	11 Kab/Kota	1 kali	50.000.000			1 kali	60.000.000
9	Monitoring Barang yang Kadaluaarsa di Pasaran	Pengawasan terhadap barang yang kadaluaarsa di pasaran	Kota Jambi	4 kali	50.000.000			4 kali	50.000.000
10.	Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen	Tersosialisasinya kebijakan yang menyangkut tentang perlindungan konsumen	-	-	-			2 kali	100.000.000
XII	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Meningkatnya nilai ekspor, calon eksportir baru dan penerbitan SKA		100%	800.000.000	APBD I		100%	1.105.000.000
Kegiatan :									
1	Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri	Terlaksananya Diklat Teknis Perdagangan Luar Negeri	Prov.Jambi	1 kali	75.000.000			1 kali	90.000.000
2	Partisipasi pada Pameran Ekspor Dalam dan Luar Negeri	Promosi produk ekspor Provinsi Jambi di dalam dan di luar negeri	Dalam dan Luar Negeri	3 kali	400.000.000			3 kali	500.000.000
3	Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah	Terlaksananya forum yang membahas permasalahan ekspor dan peluang-peluang yang dimiliki	Prov.Jambi	2 kali	100.000.000			3 kali	150.000.000
4	Pemantauan dan Pengendalian Impor Daerah	Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Impor Daerah	Prov.Jambi	12 bulan	50.000.000			12 bulan	50.000.000
5	Pelatihan Ekspor Bagi IKM, UMKM dan Koperasi	Meningkatkan pengetahuan IKM, UMKM dan Koperasi dalam pelaksanaan ekspor	Prov.Jambi	2 kali/60 orang	75.000.000			2 kali/60 orang	75.000.000
6	Pemuktahiran Data Eksportir dan Importir	Tersedianya data eksportir dan importir	Prov.Jambi	2 sub kegiatan	50.000.000			2 sub kegiatan	50.000.000
7	Pengawasan terhadap SKA dan API yang telah diterbitkan	Pemantauan terhadap kinerja eksportir dan importir yang telah mendapat ijin SKA dan API	Prov.Jambi	2 sub kegiatan	50.000.000			2 sub kegiatan	50.000.000
8.	Temu Bisnis antara Produsen dan Eksportir	Terselenggaranya pertemuan Bisnis antara Produsen dan Eksportir	-	-	-			1 kali/25 orang	40.000.000
XIII.	Program Pengembangan Standarisasi Nasional	Meningkatnya jasa pengujian mutu produk ekspor, hasil survey IKM dan peningkatan PAD		100%	1.815.000.000	APBD I		100%	2.175.000.000
Kegiatan :									
1	Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi	Terlaksananya pemeliharaan dan penggantian suku cadang infrastruktur kelembagaan standarisasi	Prov.Jambi	12 bulan	125.000.000			12 bulan	150.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Ekspor dan Impor	Bertambahnya ruang lingkup laboratorium	Prov.Jambi	12 bulan	175.000.000			12 bulan	200.000.000
3	Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang Sudah Terakreditasi	Telaksananya sosialisasi lab kalibrasi yang sudah terakreditasi	11 Kab/Kota	53 kali	150.000.000			55 kali	175.000.000
4	Penambahan Peralatan dan bahan Uji serta Perawatan laboratorium	Tersedianya peralatan dan bahan uji serta terawatnya laboratorium	Prov.Jambi	65 jenis	1.300.000.000			70 jenis	1.500.000.000
5	Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB	Meningkatnya kinerja pelayanan SDM petugas kalibrasi BPSMB	Luar Prov. Jambi	10 orang	65.000.000			10 orang	75.000.000

6	Survey IKM atas Pelayanan Lab. Kalibrasi dan Lab. Pengujian	Diketuinya IKM terhadap Pelayanan Lab. Kalibrasi dan Lab. Pengujian	11 kab/Kota	1 kali	50.000.000			1 kali	75.000.000
TOTAL					14.611.250.000				16.759.234.000

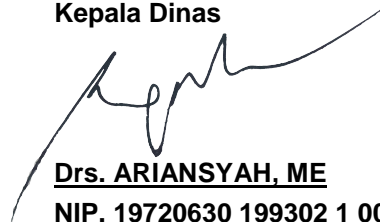
BAB IV PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah khususnya sector industri dan perdagangan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. *Community Base Depelopment* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stake holder) dalam menciptakan *Good Government* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, Rancangan Renja juga dapat dijadikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang,

Jambi, Juli 2018

Kepala Dinas



Drs. ARIANSYAH, ME

NIP. 19720630 199302 1 001